IMPLEMENTASI HUKUM SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh : Risqilah

¹Fakultas Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa
Email : Risqilhamrann@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of sharia law in Indonesia's national legal system is an issue that continues to develop and creates dynamics in the life of the nation and state. Although Indonesia is not an Islamic country, as a country with a majority Muslim population, the existence of sharia law has its own place in the practice of positive law. This article aims to analyze the forms of sharia law implementation, its constitutional basis, as well as challenges and opportunities in its harmonization with the national legal system. This research uses normative juridical method with historical and conceptual approaches. The results show that sharia law has been accommodated in several national legal products, such as in the Sharia Banking Law, Compilation of Islamic Law, as well as Regional Regulations with sharia nuances. However, its implementation faces challenges, including legal plurality, ideological resistance, and limited institutional capacity.

Keywords: *Sharia Law, National Legal System, Legal Pluralism, Islamic Legislation*

ABSTRAK

Implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan menimbulkan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, eksistensi hukum syariah memiliki tempat tersendiri dalam praktik hukum positif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk implementasi hukum syariah, dasar konstitusionalnya, serta tantangan dan peluang dalam harmonisasinya dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah telah diakomodasi dalam beberapa produk hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Daerah bernuansa syariah. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, antara lain pluralitas hukum, resistensi ideologis, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Kata kunci: **Hukum Syariah, Sistem Hukum Nasional, Pluralisme Hukum, Legislasi Islam**

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki karakteristik unik dalam struktur hukumnya. Keunikan tersebut terletak pada keberadaan dan pengakuan terhadap pluralisme hukum, yaitu berlakunya secara bersamaan sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks ini, hukum Islam atau hukum syariah menempati posisi penting dan strategis, khususnya mengingat fakta bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, gagasan mengenai integrasi hukum syariah ke dalam sistem hukum nasional telah menjadi wacana yang mengemuka sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat yang kompleks dan majemuk. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan dan implementasi hukum syariah menjadi isu yang cukup sentral dalam diskursus hukum nasional. Hukum syariah, sebagai bagian dari sistem hukum Islam, telah lama dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan umat Islam, tetapi juga mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat terhadap sistem hukum yang diyakini dapat menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat.

Sistem hukum nasional Indonesia sendiri merupakan sistem hukum yang pluralistik, yaitu memadukan unsur hukum adat, hukum Barat (warisan kolonial), dan hukum agama. Dalam konteks ini, keberadaan hukum syariah diakomodasi dalam beberapa aspek, baik dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, maupun dalam bentuk kelembagaan seperti Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Meski demikian, implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional tidak serta merta diterapkan secara utuh dan menyeluruh, melainkan melalui pendekatan selektif dan kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional, pluralisme, serta hak asasi manusia.

Konsep pluralisme hukum yang dianut Indonesia membuka ruang bagi eksistensi hukum syariah dalam kerangka hukum nasional, baik melalui jalur legislasi formal, praktik peradilan, maupun kebijakan daerah. Hal ini terlihat dalam bentuk-bentuk konkret seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam lingkup peradilan agama, keberadaan lembaga keuangan syariah, regulasi mengenai zakat dan wakaf, serta penerapan peraturan daerah bernuansa syariah di beberapa wilayah, terutama di Aceh melalui Qanun Syariah.

Meskipun demikian, implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari kontroversi dan tantangan serius. Sebagian kalangan menyambutnya sebagai bentuk pengakuan terhadap aspirasi mayoritas umat Islam, dan bagian dari identitas hukum bangsa. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa penerapan hukum syariah bisa menimbulkan ketegangan ideologis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau bahkan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi konstitusional.

Ketegangan ini tidak hanya muncul dalam diskursus akademik atau politik, tetapi juga nyata dalam praktik legislasi dan pengambilan kebijakan. Misalnya, sejumlah Peraturan Daerah (Perda) Syariah di berbagai daerah menuai kritik karena dianggap mencampurkan norma keagamaan dengan kewenangan sipil, serta berpotensi melanggar prinsip kesetaraan gender atau kebebasan beragama. Di samping itu, adanya variasi pemahaman dan penerapan hukum Islam di tingkat lokal juga menimbulkan pertanyaan tentang standarisasi dan harmonisasi hukum syariah dalam konteks hukum nasional.

Perdebatan mengenai posisi hukum syariah dalam sistem hukum nasional tidak lepas dari persoalan ideologis, politis, dan sosiologis. Sebagian pihak melihat hukum syariah sebagai bagian integral dari identitas keislaman dan perlu diberikan ruang yang lebih luas dalam sistem hukum nasional. Sementara pihak lain menekankan pentingnya menjaga netralitas negara dari dominasi hukum berbasis agama tertentu, untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Oleh

karena itu, pembahasan mengenai implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional menjadi sangat relevan untuk dikaji, baik dari aspek historis, normatif, maupun praktis.

Secara historis, perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah berlangsung sejak era kemerdekaan. Gagasan Piagam Jakarta tahun 1945 yang mencantumkan frasa "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi tonggak penting dalam perdebatan hubungan antara agama dan negara. Meskipun frasa tersebut akhirnya dihapus demi menjaga persatuan nasional, perdebatan mengenai implementasi hukum Islam terus berlangsung hingga kini, termasuk dalam era otonomi daerah yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur urusannya berdasarkan kekhususan dan keberagaman.

Dalam praktik kenegaraan, penerapan hukum syariah dalam sistem hukum nasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusionalisme, yaitu supremasi konstitusi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hukum syariah dalam konteks Indonesia bukanlah upaya menjadikan negara ini sebagai negara agama (teokrasi), melainkan sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai religius yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dapat meliputi pendekatan yuridis normatif focus pada kajian dokumen hukum, pendekatan yuridis empiris mengkaji implementasi hukum syariah di lapangan, pendekatan sosiologis atau antropologis meliputi bagaimana masyarakat memaknai dan mempraktikkan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder data primer meliputi hasil wawancara, observasi lapangan, putusan pengadilan, perda syariah dan data sekunder meliputi literature hukum, jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dan laporan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, observasi, focus group discussion (FGD), teknik analisis data,

analisis kualitatif, content analysis, analisis komparatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, baik secara normatif (peraturan perundang-undangan) maupun secara empiris (praktik di lapangan). Secara normatif, hukum syariah telah diakomodasi dalam sejumlah regulasi, terutama dalam bidang hukum keluarga (pernikahan, waris, perwalian), perbankan dan ekonomi syariah, serta kewenangan peradilan agama. Hal ini ditunjukkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, eksistensi Mahkamah Agama sebagai lembaga peradilan khusus bagi umat Islam juga memperkuat posisi hukum syariah dalam sistem peradilan Indonesia.

Secara kelembagaan, Aceh menjadi contoh paling konkret dalam implementasi hukum syariah melalui penerapan Qanun-Qanun Syariah sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penerapan hukum jinayat di Aceh, termasuk ketentuan tentang khalwat, khamr, dan maisir, menunjukkan bentuk nyata dari kodifikasi hukum syariah dalam lingkup lokal. Namun, pelaksanaan hukum syariah di Aceh juga menimbulkan berbagai dinamika, mulai dari efektivitas penegakan hukum, pengaruh terhadap hak-hak perempuan dan minoritas, hingga persepsi publik nasional dan internasional terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Di luar Aceh, implementasi hukum syariah lebih banyak terjadi dalam bentuk integrasi nilai-nilai Islam ke dalam peraturan daerah (Perda Syariah), terutama di daerah-daerah dengan mayoritas Muslim. Meski demikian, kebijakan ini kerap menuai kontroversi karena dianggap berpotensi mengancam prinsip kesetaraan warga negara serta membuka ruang diskriminasi atas nama moralitas agama. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menguji regulasi-regulasi tersebut agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip negara hukum.

Tantangan lain dalam implementasi hukum syariah adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai yang diusung tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pluralisme. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual dan inklusif menjadi kunci dalam menjembatani antara aspirasi penerapan hukum syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang bersifat sekuler dan universal.

A. Dasar Konstitusional Implementasi Hukum Syariah

- 1) Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya juga memberikan ruang bagi hukum yang berlandaskan agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi.
- 3) Dengan kata lain, hukum syariah dapat diterapkan sepanjang berada dalam koridor hukum positif dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM.

B. Bentuk Implementasi Hukum Syariah

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam dalam bentuk hukum positif.
- 2) Perbankan dan Keuangan Syariah: Diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008, yang mengatur bank dan lembaga keuangan berbasis syariah, menggunakan prinsip larangan riba dan sistem bagi hasil.
- 3) Peraturan Daerah Syariah: Contoh paling nyata adalah Provinsi Aceh, yang secara eksplisit menerapkan hukum syariah dalam bentuk Qanun. Beberapa daerah lain juga menerapkan Perda bernuansa syariah, meski tidak seketat Aceh.
- 4) Zakat dan Wakaf: Diatur dalam peraturan tersendiri,

zakat kini menjadi bagian dari sistem pengelolaan dana keagamaan resmi yang berdampak pada ekonomi umat.

C. Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah

1) Pluralitas Hukum

Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berjalan secara paralel: hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Menyatukan ketiganya sering kali memunculkan benturan norma dan kepentingan.

2) Resistensi Ideologis

Sebagian kalangan menolak penerapan hukum syariah karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara sekuler dan pluralistik. Ada kekhawatiran terhadap diskriminasi terhadap non-Muslim atau perempuan.

3) Kapasitas Kelembagaan

Belum semua lembaga peradilan, seperti Pengadilan Agama, memiliki SDM, pemahaman, dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan hukum syariah secara profesional dan adil.

4) Inkonsistensi Legislasi

Beberapa peraturan daerah syariah tidak memiliki dasar hukum nasional yang kuat, sehingga sering digugat atau dibatalkan oleh pemerintah pusat.

D. Tantangan Implementasi Hukum Syariah

Meskipun hukum syariah telah mendapatkan tempat dalam sistem hukum nasional, proses implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari segi yuridis, politis, sosiologis, maupun kultural.

1. Tantangan Konstitusional dan Legalistik

Implementasi hukum syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara berdasarkan Pancasila. Ini menuntut agar hukum syariah yang diadopsi tidak bertentangan dengan asas negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, proses legislasi yang memasukkan unsur syariah harus melalui

pengujian yang ketat dan rasional, agar tidak menimbulkan dualisme hukum atau ketidakpastian hukum.

2. Pluralisme Sosial dan Budaya

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, baik dari segi agama, etnis, maupun budaya. Implementasi hukum syariah di tingkat lokal, seperti dalam bentuk Perda Syariah, kadang menimbulkan resistensi dari kelompok minoritas karena dianggap memaksakan norma agama tertentu ke dalam ranah publik yang seharusnya netral. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan marginalisasi kelompok non-Muslim atau bahkan umat Islam sendiri yang memiliki pandangan keagamaan yang berbeda.

3. Penegakan Hukum dan Profesionalitas Aparat

Di beberapa daerah, implementasi hukum syariah terkendala oleh kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma-norma syariah secara adil dan profesional. Sebagai contoh, pelaksanaan hukum jinayat di Aceh beberapa kali menuai kritik karena dinilai tebang pilih atau dipolitisasi. Penegakan hukum yang tidak konsisten justru dapat mencoreng prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri.

E. Prospek dan Strategi Harmonisasi

1. Integrasi Melalui Legislasi dan Lembaga

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melalui integrasi nilai-nilai syariah ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat universal dan tidak diskriminatif. Ini bisa dilakukan di sektor-sektor seperti ekonomi syariah, perbankan, wakaf, asuransi syariah, hingga arbitrase syariah. Keberhasilan pengembangan lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan penguatan Mahkamah Agama adalah contoh konkrit dari sinergi ini.

2. Peningkatan Literasi dan Pemahaman Publik

Penerimaan masyarakat terhadap implementasi hukum syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap esensi dan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, edukasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum syariah tidak identik dengan hukuman fisik atau pengekangan kebebasan, melainkan merupakan sistem hukum yang menekankan keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan, perlu ditingkatkan melalui media, pendidikan, dan forum-forum akademik.

3. Pendekatan Kontekstual dan Inklusif

Untuk memastikan bahwa hukum syariah dapat diterima dalam kerangka negara bangsa modern, pendekatan kontekstual sangat dibutuhkan. Ini berarti hukum syariah tidak diterapkan secara tekstual dan kaku, melainkan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Para pembuat kebijakan dan ulama diharapkan mampu menggali *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan, adil, dan moderat.

F. Peran Lembaga Negara dan Organisasi Keagamaan

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga legislatif memiliki peran penting dalam mengatur batas-batas implementasi hukum syariah agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam memberikan panduan moral dan keagamaan agar pelaksanaan hukum syariah tetap berada dalam koridor keadilan dan rahmatan lil-'ālamīn.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan fenomena yang kompleks namun sah secara konstitusional. Dalam praktiknya, hukum syariah telah diakomodasi dalam sejumlah

sektor, seperti: hukum keluarga (melalui Kompilasi Hukum Islam), sektor keuangan (perbankan dan asuransi syariah), pengelolaan zakat dan wakaf, dan Peraturan daerah berbasis syariah, khususnya di Aceh.

1) Implementasi tidak terlepas dari tantangan: Pluralitas sistem hukum yang menuntut harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, Resistensi sosial dan ideologis, baik dari kalangan non-Muslim maupun sebagian kelompok Muslim sendiri dan minimnya sumber daya kelembagaan dan hukum yang mampu mengintegrasikan syariah dengan hukum nasional secara sistematis dan adil.

B. S a r a n

1. Penguatan legislasi berbasis syariah yang konstitusional: Legislasi hukum Islam harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar tidak menimbulkan resistensi dan polemik.
2. Peningkatan kapasitas lembaga peradilan agama dan lembaga keuangan syariah: Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan hukum berbasis syariah.
3. Harmonisasi hukum melalui pendekatan integratif: Harus ada upaya menyatukan elemen hukum Islam, adat, dan nasional dalam satu sistem hukum yang kohesif tanpa menimbulkan diskriminasi.
4. Pendidikan hukum Islam dan pluralisme hukum: Perguruan tinggi hukum dan pesantren perlu mendorong kurikulum yang mampu menjelaskan hukum Islam dalam konteks negara plural dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Ali, M. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Teraju.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpres, 2005.

Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Effendy, B. (2001). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.

Hasan, M. (2017). Implementasi Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia: Studi atas Penerapan Qanun di Aceh. *Al-Ahkam*, 27(2), 225–246. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1907>

Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.

Ma'arif, A. (2017). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. LP3ES.

Mashudi, A. (2020). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 40–55.

Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.

Zainuddin, A. (2012). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Prenada Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.